

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan perkiraan harga dari data-data harga barang/jasa dan dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan untuk menentukan kewajaran harga penawaran (Rahmadian & Ferdi, 2022). Untuk melakukan penyusunan HPS memerlukan harga material yang mengacu pada biaya yang ditetapkan oleh BUMN atas bahan baku atau material yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Perkiraan ini biasanya didasarkan pada beberapa faktor, seperti biaya pasar yang menjadi acuan utama dalam menentukan harga material BUMN, biaya produksi, ketentuan pemerintah terkait harga material tertentu, dan struktur pasar seperti tingkat persaingan yang juga dapat mempengaruhi harga material BUMN (Putra, 2019).

Penginputan data harga barang seringkali menghadirkan berbagai masalah yang dapat mempengaruhi ketepatan dan kecepatan kerja sistem informasi. Salah satu isu utama adalah tingginya resiko kesalahan manusia, seperti kesalahan penulisan atau ketidakonsistenan dalam penulisan data, yang dapat menyebabkan informasi yang tidak tepat. Kurangnya prosedur operasional yang jelas dalam penginputan antar karyawan dapat menghasilkan data harga barang yang tidak seragam. Hal ini terjadi karena penginputan sebelumnya hanya menggunakan *Microsoft Excel*. Oleh karena itu, masalah-masalah ini menyoroti perlunya penerapan sistem yang lebih baik untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan kerja dalam pengelolaan data harga barang.

Dalam mengatasi masalah penginputan data harga barang di atas, penerapan sistem yang lebih efisien adalah solusi yang tepat. Dengan menggunakan Aplikasi *Integrated Procurement System (IPS)*, proses penginputan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, sehingga mengurangi resiko kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Selain itu, setelah melakukan penginputan data harga barang menggunakan Aplikasi *Integrated Procurement System (IPS)*, kita dapat secara langsung

mendapatkan nomor material. Nomor Material ini digunakan untuk mempermudah identifikasi untuk setiap barang yang dimasukkan ke dalam aplikasi, sehingga dapat memudahkan kita dalam melakukan pengelolaan dan pencarian data harga barang.

Penerapan Aplikasi *Integrated Procurement System (IPS)* sangat penting untuk meningkatkan kecepatan kerja dan akurasi dalam penginputan data harga barang. Penginputan data sebelumnya sering kali rentan terhadap kesalahan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak tepat, berdampak buruk pada pengambilan Keputusan. Dengan menggunakan Aplikasi *Integrated Procurement System (IPS)*, penginputan data dapat dilakukan lebih cepat, mengurangi resiko kesalahan manusia, serta mempercepat akses ke informasi yang dibutuhkan. Selain itu, fitur nomor material dalam aplikasi memudahkan identifikasi barang secara terstruktur, sehingga meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan pencarian data harga barang. Oleh karena itu, implementasi sistem ini akan mendukung operasional yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas Perusahaan.

1.2 Tujuan

Tujuan laporan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “Pemrosesan data Harga Barang dalam Aplikasi *Integrated Procurement System (IPS)* pada PT. Perkebunan Nusantara I Regional 7” ini adalah untuk meningkatkan kecepatan kerja dan ketepatan dalam proses pengadaan barang, mengurangi kesalahan manusia dan duplikasi data, serta memastikan bahwa informasi harga yang tersedia selalu terbaharui dan konsisten.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

Terhitung sejak 1 Desember 2023, PTPN I regional 7 (dulu PTPN VII) resmi menjadi bagian dari Subholding Supporting Co di bawah Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). Subholding ini membawahi berbagai komoditas di luar gula dan kelapa sawit, dengan PTPN I sebagai entitas ekonominya. Setelah berubah dari PTPN VII menjadi Unit Kerja Subholding PTPN I Regional 7, struktur kewenangan tertinggi terdiri dari satu Kepala Daerah dan dua orang Senior Officer Bad President (SEVP) dengan satuan kerja yang belum terpakai di mana beberapa jabatan menjadi bagian dari Tata Usaha Kantor Pusat (HO) Supporting Co. Hal ini pun berdampak pada tata kerja organisasi di level saat ini yang awalnya terdiri dari sembilan Area dengan sembilan Kepala Area, kini berkurang menjadi enam Area. Pengurangan jumlah segmen ini tentu saja membuat organisasi menjadi lebih ramping dan tangguh.



Gambar 1. Pembentukan PTPN I Regional 7

2.1.1 Visi

Menjadi Perusahaan Agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis yang terbaik.

2.1.1 Visi

- a. Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan.

- b. Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan.
- c. Memberlakukan karyawan sebagai asset strategis dan mengembangkannya secara optimal
- d. Menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik bagi investor.
- e. Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis.
- f. Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas.
- g. Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.

2.1.1 Logo



Gambar 2. Logo Perusahaan

2.2 Tujuan dan Kegiatan Usaha Utama PTPN I Regional 7

2.2.1 Tujuan Utama

PT. Perkebunan Nusantara I Regional 7 bergerak dalam bidang agribisnis dan agroindustri serta memaksimalkan pemanfaatan aset perusahaan. Tujuan perusahaan adalah menghasilkan produk atau jasa yang bermutu tinggi dan memiliki daya saing yang kuat untuk meraih keuntungan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mewujudkan standard Perusahaan Risiko Terbatas (PT).

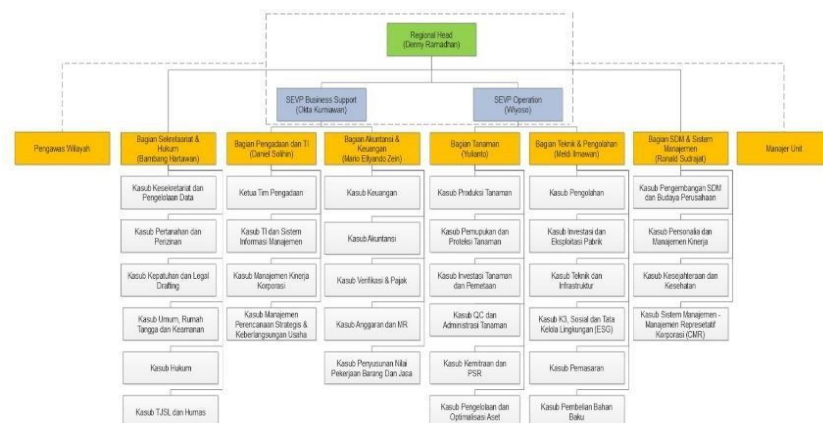
2.2.2 Kegiatan Usaha Utama

Untuk mencapai tujuan, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha utama:

- Pengusahaan tanaman mencakup pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemungutan hasil tanaman, serta melakukan kegiatan lain yang terkait dengan pengusahaan tanaman.
- Pengolahan hasil tanaman sendiri atau dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, bersama dengan produk turunannya, dikenal sebagai produksi.
- Perdagangan termasuk melakukan aktivitas perdagangan lainnya yang berkaitan dengan bisnis Perseroan serta melakukan aktivitas pemasaran berbagai macam produk yang diproduksi.
- Perluasan bisnis perkebunan, agrowisata, agrobisnis, dan agroindustri.

2.2.3 Struktur Perusahaan

Struktur organisasi dapat menjadi instrumen formal yang mengawasi sebuah organisasi, yang menunjukkan sistem dan tindakan hubungan yang mapan antara kapasitas, segmen atau posisi, tugas, spesialis, dan tugas yang berbeda dalam organisasi. Struktur organisasi PT Perkebunan INusantara I Regional 7 dapat disajikan pada Gambar dibawah ini



Gambar 3. Struktur Organisasi PTPN I Regional 7

2.3 Bagian Akuntansi & Keuangan PTPN I Regional 7

2.3.1 Tata Kelola bagian Akuntansi & Keuangan

Guna memastikan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Akuntansi dan Keuangan berjalan sesuai sasaran perusahaan, maka ditetapkan struktur tata kelola Bagian Akuntansi dan Keuangan sebagai berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi Bagian Akuntansi & Keuangan

2.3.2 Tugas Pokok Sub-Bagian Akuntansi & keuangan

1. Memastikan Penanganan catatan pertukaran penjualan perusahaan, perincian terkait keuangan, pengumuman administrasi, perhitungan *Key Performance Indikator*, dan pemeriksaan anggaran yang diperlukan dapat diakses secara wajar, tepat, dan tepat waktu.
2. Memastikan penyampaian laporan keuangan/laporan manajemen kepada pihak eksternal yang membutuhkan (Holding Perkebunan, Pemegang Saham, Komisaris, BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kreditur).